

**LAKIP**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2018**



**BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI**  
**LAMPUNG**

**Jln. Wolter Monginsidi No.69 Teluk**  
**Betung**

**BANDAR LAMPUNG**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dapat terselesaikan.

LAKIP ini merupakan laporan pencapaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2018 melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018. Dengan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dikarenakan dengan adanya laporan kinerja maka kinerja yang telah dicapai dapat dievaluasi guna perbaikan kinerja kedepannya. Proses penyusunan LAKIP ini dilakukan secara partisipatif dengan melakukan koordinasi di ruang lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

Akhirnya semoga LAKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja yang efektif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran tetapi juga pada pencapaian kinerja.

Bandar Lampung,           Maret 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,**



**Drs. MINHAIRIN, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP.19620603 198511 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR  
RINGKASAN EKSEKUTIF  
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung ...	I.2
1.3 Tugas dan Fungsi .....	I.4
1.4 Isu Strategis .....	I.13
1.5 Landasan Hukum .....	I.14
1.6 Inovasi Terbaru.....	I.14
1.7 Sistematika.....	I.18
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	II.1
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .....	II.1
2.2 Perencanaan Strategi Hasil Reviu .....	II.7
2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	II.12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	III.1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	III.3
3.3 Pengukuran Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..	III.4
3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis .....	III.12
3.5 Analisis Pencapaian Kinerja .....	III.15
3.6 Permasalahan dan Solusi .....	III.22
3.5 Prestasi dan Penghargaan .....	III.26
BAB IV PENUTUP .....	IV.1

Lampiran - lampiran

## DAFTAR TABEL

1.1	Dasar Hukum Pembentukan .....	I.3
1.2	Daftar Pegawai .....	I.3
2.1	Tujuan,Sasaran,Indikator dan Target Kinerja .....	II.3
2.2	IKU .....	II.5
2.3	Perjanjian Kinerja .....	II.7
2.4	Tujuan,Sasaran,Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu .....	II.8
2.5	IKU,Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu .....	II.10
2.6	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu .....	II.12
3.1	Skala Pengukuran Ordinal dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP...	III.2
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran OPD .....	III.2
3.3	Capaian IKU .....	III.4
3.4	Capaian Indikator Kinerja .....	III.5
3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran .....	III.5
3.6	Pencapaian Target Misi .....	III.6
3.7	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	III.6
3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 1 .....	III.8
3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 2 .....	III.9
3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 3 .....	III.10
3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 4 .....	III.11
3.12	Pengukuran Kinerja .....	III.12
3.13	Pencapaian Kinerja .....	III.13
3.14	Capaian Kinerja Sasaran .....	III.14
3.15	Pencapaian Target Misi .....	III.14
3.16	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018 .....	III.15
3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 1 .....	III.17
3.18	Analisis Pencapaian Sasaran 2 .....	III.17
3.19	Analisis Pencapaian Sasaran 3 .....	III.18
3.20	Analisis Pencapaian Sasaran 4 .....	III.19
3.21	Pencapaian Indikator Sasaran 1 .....	III.20
3.22	Pencapaian Indikator Sasaran 2 .....	III.20

3.23	Pencapaian Indikator Sasaran 3 .....	III.21
3.24	Pencapaian Indikator Sasaran 4 .....	III.22
3.25	Pagu dan Realisasi Anggaran .....	III.23
3.26	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Misi .....	III.24
3.27	Efisiensi Anggaran .....	III.25



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga



penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung, secara umum tugas dan fungsinya yaitu mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, penyerahan kewenangan pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan.





Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/52/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.



16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai

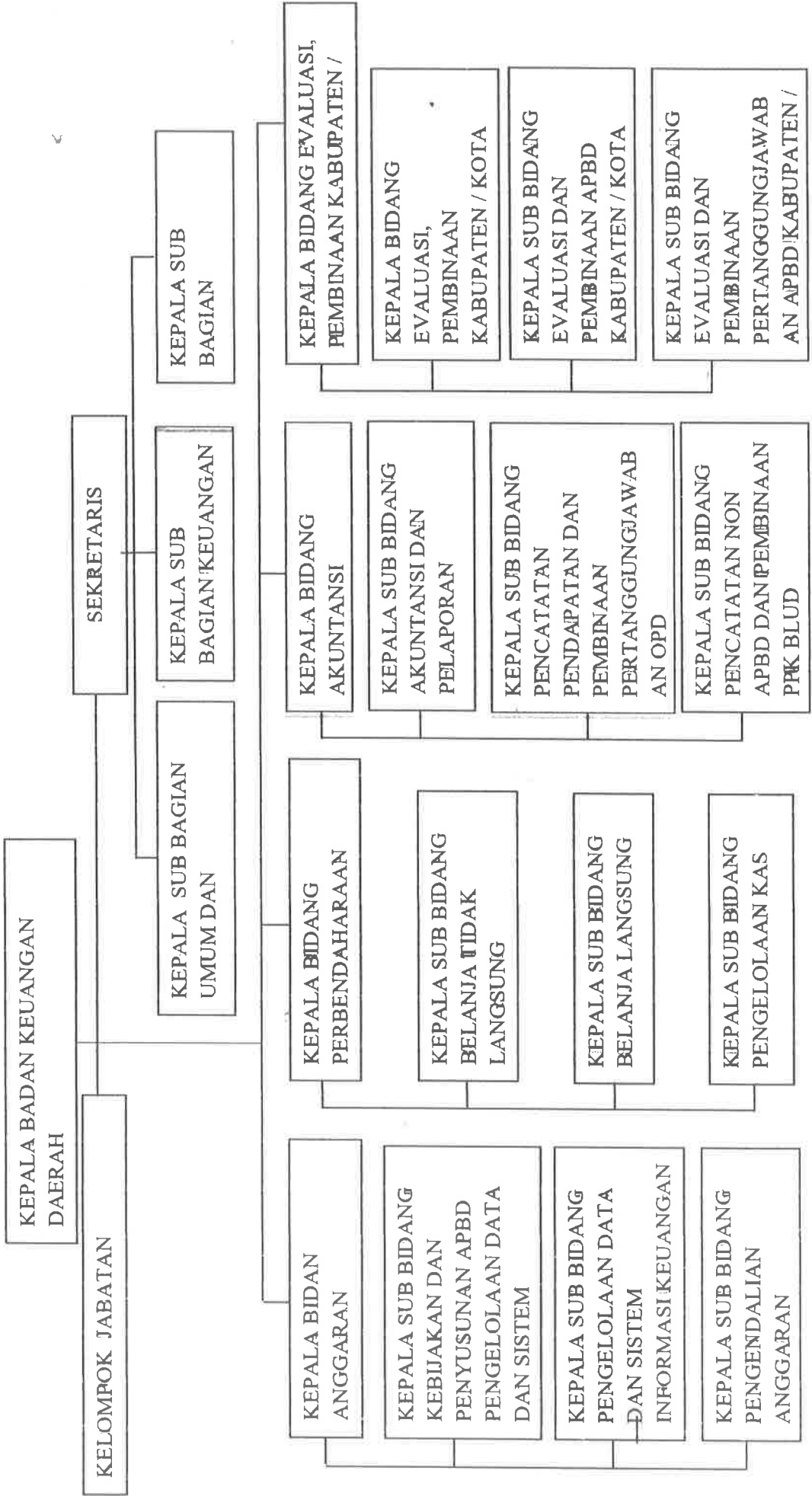
No	URAIAN	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	13	13	2	-	-	-	28
3	Bidang Anggaran	-	9	8	-	1	-	-	17
4	Bidang Perbendaharaan	-	3	21	-	7	-	-	31
5	Bidang Evaluasi Pem binaan Kab/kota, inv.	-	12	6	2	-	-	-	21
6	Bidang Akuntansi	-	13	9	-	3	-	-	25
		<b>Jumlah</b>							<b>123</b>

Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan daerah. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah.



Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG





### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban: Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis, dibidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi bidang keuangan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh Drs.MINHAIRIN,M.M. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Sekretaris Bakeuda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dan perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan umum dan administrasi keuangan</li><li>2. Untuk melaksanakan tugas</li></ol>



v		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretaris mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan program</li><li>b. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi umum</li><li>c. Perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi keuangan</li><li>d. Pemverifikasi dan pengkoordinasian bahan penyusunan naskah dinas</li><li>e. Pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan pengevaluasi pelaksanaan penegakan budaya kerja dan reformasi birokrasi</li><li>f. Pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan pengevaluasi dukungan pembinaan dan pengawasan penggunaan anggaran</li><li>g. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah</li><li>h. Pelaksanaan verifikasi laporan tingkat kehadiran dan penilaian kinerja aparatur</li><li>i. Pengkoordinasian bahan penyusunan rencana kerja,</li></ul>
---	--	--



		<p>program dari kegiatan serta anggaran</p> <p>j. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan</p> <p>k. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan humas dan penyelenggaraan informasi publik</p> <p>l. Pengkoordinasian dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian</p> <p>m. Pengkoordinasian penataan kelembagaan dan tata laksana unit kerja dalam rangka penyelenggaraan fungsi</p> <p>n. Pengkoordinasian penyelenggaraan usulan pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan pejabat fungsional, perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku</p> <p>o. Pengkoordinasian dan menyelenggarakan pembinaan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja</p> <p>p. Pemberian masukan kepada pimpinan terkait pembinaan evaluasi kinerja aparatur</p> <p>q. Pengkoordinasian dan menyiapkan bahan pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pejabat fungsional perencanaan</p>
2.	Kasubbag umum dan kepegawaian	Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi



Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

		umum; kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, pengelolaan barang daerah dan rumah tangga
3	Kasubbag keuangan	Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran, pembukuan dan perbendaharaan
4	Kasubbag perencanaan	Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan program dilingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
5	Kabid Anggaran	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang anggaran, menyiapkan rencana dan program bidang anggaran, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitas dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan anggaran, penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah
6	Kasubbid kebijakan dan penyusunan APBD	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
7	Kasubbid pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah	Menyiapkan bahan perumuskan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan



		penyelenggaraan sistem Informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
8	Kasubbid bidang pengendalian anggaran	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian anggaran, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pengendalian anggaran
9	Kabid Perbendaharaan	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan, menyiapkan rencana dan program, pelaksanaan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), mengusulkan pengangkatan/penggantian penanggung jawab pengguna anggaran dan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, penatausahaan dan pembinaan pajak, serta pembinaan fasilitasi terhadap administrasi keuangan bendahara
10	Kasubbid belanja tidak langsung	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja pegawai, penyusunan rencana program pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi pelaporan bidang perbendaharaan belanja pegawai, menyiapkan bahan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penatausahaan dan





		pembinaan pajak dan penyusunan laporan anggaran belanja pegawai
8	Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengendalian Anggaran, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pengendalian anggaran
9	Kabid Akutansi	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang akuntansi, menyiapkan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara, pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi dan akuntansi keuangan pemerintah daerah, serta menyusun laporan keuangan daerah, meliputi laporan realisasi APBD, laporan operasional, neraca daerah, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan penyusunan laporan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta monitoring, pengendalian dan evaluasi PPK BLUD
10	Kasubbid Akutansi dan Pelaporan	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan, penyusunan



		rencana dan program Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah, penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah
11	Kasubbid Pencatatan pembinaan pertanggung jawaban organisasi perangkat daerah	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan rencana dan program Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban penerimaan daerah, penyusunan akuntansi penerimaan kas daerah serta penyusunan laporan penerimaan keuangan daerah
12	Kasubbid Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD	menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi, dan monitoring PPK-BLUD serta pencatatan Dana Non APBD (DK/TP)
13	Kabid Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi APBD Kabupaten/Kota, penyusunan perencanaan dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, serta penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi investasi daerah, pengelolaan



		keuangan maupun sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota
14	Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi
15	Kasubbid Bidang Investasi	Melaksanakan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah tentang investasi daerah mulai penyusunan rencana kegiatan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah; divestasi serta melakukan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah

#### 1.4 Isu Strategis

1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah
2. Sinergi antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan daerah
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Perbaikan dan Peningkatan kinerja BUMD
6. Penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan dari penganggaran hingga pertanggungjawaban



7. penyajian informasi dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah lainnya yang berlaku
8. Pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah

## 1.5 Landasan Hukum

LAKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015 - 2019.

## 1.6 Inovasi Terbaru

Inovasi terbaru yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Keuangan Daerah adalah E-Planning dan E-Budgeting pada SIPPKD. Tahun 2018 Bakeuda memiliki aplikasi keuangan SIMDA. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Sumatera Utara untuk mengadopsi aplikasi E-Planning



dan E-Budgeting yang dibimbing oleh KPK melalui SIPPKD atau Sistem Informasi Perencanaan Pengelola Keuangan Daerah.

SIPPKD merupakan suatu ekosistem aplikasi perencanaan keuangan dan pelaporan yang *independent swakelola* yang dikelola pemerintah secara *online, realtime* dan terintegrasi, terdiri dari E-SSH, E-Planning dan E-Budgeting yang menghasilkan output :

- a. 22.000 data standar satuan harga
- b. 1.250 data harga satuan pokok kegiatan
- c. 135 data analisis standar biaya

Sinergi dengan peraturan undang-undang 1945 tentang perencanaan serta telah menghasilkan RKPD, Renstra, Renja 2019 berbasis SSH pada aplikasi E-Planning.

1. KUPPAS Tahun Anggaran 2019 berbasis RKA
2. Perancangan perda APBD Tahun Anggaran 2019
3. Perda APBD Tahun Anggaran 2019
4. DPA SKPD Tahun Anggaran 2019

Pada aplikasi E-Budgeting modul E-belanja terintegrasi dengan LKPP dapat digunakan, modul evaluasi Kab/Kota sudah tersedia diaplikasi SIPPKD. Prinsip Independen swakelola SIPPKD mengembangkan inovasi terintegrasi dengan aplikasi dalam hal proses ekspor impor data, pertukaran informasi antara lain: Sirup LKPP, Sinergi KemenKeu, Simpeda BKD, E-Budgeting, Pemda *online* Bank Lampung sehingga menghasilkan;

- a. Implementasi transaksi non tunai
- b. Setoran, penerimaan daerah *online*
- c. Realisasi pendapatan belanja secara *realtime* pemprov mendorong membimbing mensupport untuk mengaplikasikan SIPPKD pada seluruh Kab/Kota diprovinsi lampung

Aplikasi SIPPKD menghasilkan;

1. Evaluasi APBD dan pertanggung jawaban Kab/Kota dengan mekanisme integrasi SIPPKD provinsi dengan SIPPKD Kab/Kota
2. SIPPKD dapat mempermudah pelaksanaan evaluasi APBD secara *online*, efektif, efisien menghasilkan keputusan gubernur tentang evaluasi APBD Kab/Kota yang komprehensif sehingga provinsi lampung menjadi provinsi yang terintegrasi antara

pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota sehingga menjadi “*smart province*” dan “*good governance*” pemerintah yang bersih, transparansi, akuntabel, dan pemerintah yang terintegrasi.

Adapun manfaat dari E-budgting adalah Meningkatkan kualitas APBD sehingga anggaran yang disusun SKPD sesuai dengan alokasi belanja, memiliki dasar analisa biaya yang akurat dan akuntabel dan sesuai dengan RPJMD melalui E-Budgeting mempermudah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran. Sehingga proses penyusunan anggaran semakin mudah dan cepat karena sudah tersistem dan *online*. Anggaran daerah semaki transparan dan juga mempermudah bagi instansi terkait dalam membuat laporan.

Aplikasi SIPPKD menghasilkan evaluasi APBD dan pertanggungjawaban Kabupaten/Kota dengan mekanisme integrasi SIPPKD Povinsi dan SIPPKD Kab/Kota. Aplikasi SIPPKD dapat mempermudah pelaksanaan evaluasi APBD secara *online*, efektif dan efisien.



Gambar 1.1

Halaman Website E-Planning



Gambar 1.2

Halaman Website E-Budgeting

## 1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2018 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### BAB IV PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

#### a. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga





Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

### **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi ke-5 dari RPJMD yaitu: Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif", dengan Tujuan pembangunan "Memperkuat Kapasitas Manajemen Birokrasi".

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan



secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2015-2019 sebanyak 6 (enam) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan yang baik dan efisien dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perda APBD Tepat Waktu (Dukungan capaian WTP)	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	30-10-2018	31-12-2019
			Jumlah peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang ditetapkan	3	3	3	3	3
			Presentase Tingkat penyerapan APBD	95	95	95	95	100
			Jumlah kab/kota yang menetapkan APBD Tepat Waktu	15	15	15	15	15
		Penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu dengan penerapan standar	Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu (dukungan capaian WTP)	31-03-2015	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2019



	akuntansi pemerintahan (SAP)							
			Jumlah kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu dan sesuai SAP	15	15	15	15	15
2	Terwujudnya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan yang terintegrasi	Peningkatan pemanfaatan Sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam proses pengelolaan keuangan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	48	48	48	48	48
			Jumlah Tersedianya Website Badan Keuangan Daerah Provinsi	ada	ada	1	1	1
3	Terciptanya Optimalisasi Kinerja BUMD	Meningkatnya kinerja BUMD	Rasio Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD	65	66	67	70	73
4	Terciptanya SDM berkualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya SDM yang handal	Rasio PNS yang menguasai operasional pengelolaan keuangan daerah	36	42	48	54	60
5	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan yang baik dan efisien dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kab/kota tepat waktu	15	15	15	15	15
			Batas waktu penetapan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019



**b. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 6/919/B.XII/HK/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemprov Lampung Tahun 2015-2019 tanggal 15 Desember 2015.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan yang baik dan efisien dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Agar pembangunan berjalan optimal maka pelaksanaan APBD harus tepat.	Penetapan APBD 31 Desember 2018	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
		Jumlah Peraturan	Peraturan	Pengelolaan keuangan akan optimal apabila	Jumlah peraturan	Permendagri Nomor 13



	dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang ditetapkan		merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku baik ditingkat pusat maupun daerah		Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah	
	Jumlah kab/kota yang menetapkan APBD tepat waktu	kab/kota	Pembangunan di Kab/kota akan berjalan optimal apabila penetapan APBD tepat waktu	Jumlah kab/kota	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah	
	Tingkat Penyerapan APBD	%	Pembangunan akan berjalan optimal apabila tingkat penyerapan APBD tinggi.	(Realisasi APBD/Jumlah APBD) X 100%	Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD	
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah tepat waktu dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Dalam rangka meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, maka laporan keuangan yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan, penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disampaikan tepat waktu. Indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah tercapainya opini WTP	Penyampaian laporan keuangan 31 Maret 2018	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
	Jumlah kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	kab/kota	Akuntabilitas pengelolaan keuangan dinilai dengan salah satu indikator penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah kab/kota	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah	



3	Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen keuangan daerah dalam proses pengelolaan keuangan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	OPD	proses pengelolaan keuangan akan lebih maksimal jika memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Jumlah OPD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
		Tersedia Website Badan Keuangan Daerah	Ada/tidak	Penyampaian informasi akan lebih mudah jika tersedia Website Badan Keuangan Daerah	Ada/tidak	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
4	Meningkatnya kinerja BUMD	Rasio Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD	%	Kinerja BUMD dianggap meningkat jika rasio Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD meningkat	(Pendapatan BUMD : penyertaan modal BUMD) X 100%	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah

### c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen



Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan yang baik dan efisien dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Perda APBD Tepat Waktu (Dukungan capaian WTP)	30-10-2018
		Jumlah peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang ditetapkan	3
		Presentase Tingkat penyerapan APBD	95
		Jumlah kab/kota yang menetapkan APBD Tepat Waktu	15
2	Penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP)	Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu (dukungan capaian WTP)	31-03-2018
		Jumlah kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu dan sesuai SAP	15
3	Peningkatan pemanfaatan Sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam proses pengelolaan keuangan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	48
		Jumlah Tersedianya Website Badan Keuangan Daerah Provinsi	1
4	Meningkatnya kinerja BUMD	Rasio Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD	70
5	Terciptanya SDM yang handal	Rasio PNS yang menguasai operasional pengelolaan keuangan daerah	54
6	Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan yang baik dan efisien dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kab/kota tepat waktu	15
		Batas waktu penetapan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	31-12-2018



## 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2018, sebagai berikut :

### 1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu  
Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019





1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	.Waktu	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	30-10-2018	31-12-2019
			Tingkat Penyerapan APBD	%	95 %	95 %	95 %	95 %	92 %
			Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15	15	15	15	15
2	Terwujudnya pelayanan bidang keuangan yang cepat dan akurat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	%			100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%			100 %	100 %	100 %
3	Terciptanya SDM berkualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			100 %	100 %	100 %

## 6. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu



Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:



Badan Keuangan Daerah

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	Dalam rangka meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, maka laporan keuangan yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan, penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disampaikan tepat waktu. Indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah tercapainya opini WTP.	Batas Waktu penetapan peraturan pengelolaan keuangan tidak melebihi tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
		Presentase Tingkat penyerapan APBD	%	salah satu indikator pengukuran kinerja adalah dengan tingkat serapan APBD	(realisasi APBD : target APBD) x 100 %	Perda dan Pergub tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung	Perda dan Pergub tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung



Badan Keuangan Daerah

	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan waktu yang berlaku	kab/kota	Supaya pelaksanaan APBD kab/kota selaras dengan arah pembangunan yang dituju oleh Pemerintah Provinsi Lampung maka RAPBD kab/kota harus dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan APBD kab/kota	Jumlah SK rekomendasi hasil evaluasi APBD kab/kota	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
--	---	----------	---	--	---	---



### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2018 31-03-2018
		Tingkat Penyerapan APBD	%	92 %
		Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15 Kab/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	%	100 %
4	Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100 %
5	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100 %



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Ordinal dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP**

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>	<b>Kode Warna</b>
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Memuaskan	> 100	
2	Sangat Baik	> 90	
3	Baik	75.00 – 89.99	
4	Cukup	65.00 – 74.99	
5	Kurang	50.00 – 64.99	
6	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/476/VI.01/HK/2017 Penyempurnaan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator





- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

### **3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 900/572.a/VI.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/919/B.XII tentang Indikator Kinerja Utama Lampung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2018 31-03-2018	31-12-2018 31-03-2018	100.00
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	92 %	88 %	95.65
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Perda APBD Tepat Waktu dan Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu (Dukungan capaian WTP), dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kab/kota tepat waktu, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Presentase Tingkat penyerapan APBD, dengan capaian kinerja 95.65 %.

### 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk



mencapai visi dan misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2018 31-03-2018	31-12-2018 31-03-2018	100.00
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	92 %	88 %	95.65
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100.00
4	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100 %	100 %	100.00
5	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	%	100 %	100 %	100.00
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100 %	100 %	100.00
7	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100 %	100 %	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :



**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0,00 %
2	Sesuai Target	85,71 %
3	Tidak Mencapai Target	14,29 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 5	7	0	0,00	6	91,67	1	14,29
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>85,71</b>	<b>1</b>	<b>14,29</b>

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

## v Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 5	7	100.00
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00
2	Sesuai Target	6	85.71
3	Tidak Mencapai Target	1	14.29

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

**Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8****Analisis Pencapaian Sasaran 1**

**Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2015	31-12-2015	100.00	31-12-2016	31-12-2016	100.00	31-12-2017	31-12-2017	100.00	31-12-2018	31-12-2018	100.00
			31-03-2015	31-03-2015		31-03-2016	31-03-2016		31-03-2017	31-03-2017		31-03-2018	31-03-2018	
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	95	92.97	97.86	95	94.32	99.28	95	91.49	96.30	92	87.87	95.51
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15	15	100.00	15	15	100.00	15	15	100.00	15	15	100.00

Sasaran Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan yang baik dan efisien dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah " adalah waktu 31-12-2018 dan 31-03-2018 dari target dengan batas waktu 31-12-2018



dan 31-03-2018 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Presentase Tingkat penyerapan APBD" adalah sebesar 87.87 dari target sebesar 92 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95.51 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Presentase Tingkat penyerapan APBD" tahun ini menurun 0.79 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 96.30

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Presentase Tingkat penyerapan APBD" tahun ini adalah sebesar 95.51 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 97.24 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kab/kota tepat waktu" adalah sebesar 15 dari target sebesar 15 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kab/kota tepat waktu" tahun ini meningkat 0.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 3 "Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kab/kota tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan



Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

### Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran " adalah dengan persentase 100.00 dari target persentase 100.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra





Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu dan sesuai SAP" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

**Sasaran 3**  
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	%						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	



Sasaran, Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur" adalah sebesar 100.00 dari target sebesar 100.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur" tahun ini meningkat 0.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

<b>Sasaran 4</b>
Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**

**Analisis Pencapaian Sasaran 4**

**Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		%	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem	%					100	100	100.00	100	100	100.00



Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√											
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan" adalah sebesar 100.00 dari target sebesar 100.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan" tahun ini meningkat 0.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

#### Sasaran 5

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

#### Analisis Pencapaian Sasaran 5

#### Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber	%							100	100	100.00	100	100	100.00



Daya Aparatur																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran Terciptanya SDM yang handal dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

**Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.**

**Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.**

### **3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2015-2019 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama dalam Reviu RENSTRA 2015-2019 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 Indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 Indikator



- Sasaran 3 terdiri dari 1 Indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 Indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 Indikator

Secara umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. (outcome) sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah**  
**Provinsi Lampung Tahun 2018**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2018	31-12-2018	100.00
			31-03-2018	31-03-2018	
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	92 %	88 %	95.65
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100.00
4	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100 %	100 %	100.00
5	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	%	100 %	100 %	100.00
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100 %	100 %	100.00
7	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100 %	100 %	100.00



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Lampung Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**  
**Lampung Tahun 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN	CAPAIAN
1	Memuaskan	> 100	
2	Sangat Baik	> 90	
3	Baik	> 75,00 – 89,99	
4	Cukup	> 65,00 – 74,99	
5	Kurang	> 50,00 – 64,99	
6	Sangat Kurang	0 – 49,99	

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah**  
**Provinsi Lampung Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	0-30	>30-50	>50-65	>65-75	>90	>100
				Kurang	Agak Kurang	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	Memuaskan
A	Sasaran 1	3	98.50						
B	Sasaran 2	1	100						
C	Sasaran 3	1	100						
D	Sasaran 4	1	100						
E	Sasaran 5	1	100						



Dari 5 (lima) Sasaran yang telah diukur capaian kinerja sebagaimana tabel diatas, 6 (tujuh) indikator, pencapaian realisasi 100 % dan 1 (satu) indikator 95.65 % indikator kinerja sasaran terhadap target pada misi yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Pencapaian target Misi Badan Keuangan Daerah**  
**Provinsi Lampung Tahun 2018**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian								
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)				
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%			
1	Misi 5	7				85.71					14.29
	Jumlah	7									

Dari 1 (satu) misi dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, kategori pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan misi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
<b>A.</b>	<b>Misi 5</b>		
1	Memuaskan		
2	Sangat Baik	7	99.98 %
3	Cukup		
4	Agak Kurang		



No.	Kategori	Jumlah-Indikator	Presentase
5	Kurang		

### 3.5 Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 serta membandingkan antara target dan realisasi pada 5 (lima) indikator sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja dari 1 Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat internasional.sebagai berikut :





**Sasaran 1**

**Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pencapaian sasaran 1 meliputi 3 (tiga) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.18**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2015	31-12-2015	100,00	31-12-2016	31-12-2016	100,00	31-12-2017	31-12-2017	100,00	31-12-2018	31-12-2018	100,00
			31-03-2015	31-03-2015		31-03-2016	31-03-2016		31-03-2017	31-03-2017		31-03-2018	31-03-2018	
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	95	92,97	97,88	95	94,32	99,28	95	91,49	96,30	92	87,87	95,51
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15	15	100,00	15	15	100,00	15	15	100,00	15	15	100,00
Rata-rata Capaian IKU					99,29 %			99,76 %			98,77 %			98,50 %
Kinerja Capaian Sasaran					99,29 %			99,76 %			98,77 %			98,50 %



Sasaran Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator telah mencapai target sebesar 99.08%.

**Sasaran 2**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pencapaian sasaran 2 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.19**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Rata-rata Capaian IKU											100 %			100 %
Kinerja Capaian Sasaran											100 %			100 %

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, dapat dilihat dari 1 (satu) indikator telah mencapai target sebesar 100%.



**Sasaran 3**

**Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pencapaian sasaran 3 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.20**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Rata-rata Capaian IKU											100 %			100 %
Kinerja Capaian Sasaran											100 %			100 %

Sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilihat dari 1 (satu) indikator telah mencapai target sebesar 100%.



**Sasaran 4**

**Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pencapaian sasaran 4 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.21**

**Analisis Pencapaian Sasaran 4**

**Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian IKU											100 %			100 %
Kinerja Capaian Sasaran											100 %			100 %

Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator telah mencapai target sebesar 100%.

**Sasaran 5****Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pencapaian sasaran 4 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.22**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 5**  
**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian IKU											100 %			100 %
Kinerja Capaian Sasaran											100 %			100 %

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilihat dari 1 (satu) indikator telah mencapai target sebesar 100%.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran 1 sampai dengan tahun 2018 dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.23**  
**Pencapaian Indikator Sasaran 1**  
**Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan**  
**Keuangan Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2018 31-03-2018	31-12-2018 31-03-2018	100%
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	94.25	91.67	97.26%
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	60	60	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 99.09 % atau katagori Sangat Baik.

Pencapaian sasaran Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan indikator yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan adalah belum sesuai dengan target yang ditentukan.

Tabel 3.24

## Pencapaian Indikator Sasaran 2

## Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	33.33	33.33	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 100 % atau katagori Sangat Baik.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran berdasarkan indikator yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan adalah sesuai dengan target yang ditentukan.

Tabel 3.25

## Pencapaian Indikator Sasaran 3

## Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	%	33.33	33.33	100%



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 100 % atau katagori Sangat Baik.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur berdasarkan indikator yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan adalah sesuai dengan target yang ditentukan.

**Tabel 3.26**

**Pencapaian Indikator Sasaran 4**

**Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	33.33	33.33	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 100 % atau katagori Sangat Baik.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berdasarkan indikator yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan adalah sesuai dengan target yang ditentukan.



**Tabel 3.27**  
**Pencapaian Indikator Sasaran 5**  
**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	33.33	33.33	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 100 % atau katagori Sangat Baik.

Pencapaian sasaran Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur berdasarkan indikator yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan adalah sesuai dengan target yang ditentukan.

### 3.6 Permasalahan dan Solusi

1. Kurangnya koordinasi untuk pelaporan LKIP sehingga diharapkan kedepannya lebih mengedepankan komunikasi antar operator SAKIP.
2. Adanya perubahan-perubahan aplikasi yang berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan keuangan sehingga membutuhkan waktu penyesuaian bagi setiap operator.

### 3.7 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 25.889.476.250,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 23.883.126.723,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,25%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.28**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2018**

No	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
5	<i>Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif</i>	Rp. 25.889.476.250,00	Rp. 23.883.126.723,00	92,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 25.889.476.250,00</b>	<b>Rp. 23.883.126.723,00</b>	<b>92,25</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.29

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
B.	Misi 5,	7			
1	Memuaskan				
2	Sangat Baik		99,34		
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				
				Rp. 23.883.126.723,00	92,25

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Tabel 3.30

**Efisiensi Anggaran Tahun 2018**

NO	NILAI EFISIENSI	TOTAL ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	JUMLAH PROGRAM & KEG YANG DIFOKUSKAN	TOTAL PROGRAM & KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.				NIHIL		



Pada APBD-P Tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung secara umum tidak mengalami efisiensi tetapi dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran maka dari itu ada kegiatan yang anggarannya bertambah ataupun berkurang, namun demikian APBD-P Tahun 2018 justru mengalami kenaikan dari Rp. 16.989.500.000,00 menjadi Rp. 25.889.476.250,00. Kenaikan ini sebesar Rp. 8.899.976.250,00 atau sebesar 52,38 %. Kenaikan pagu anggaran ini tersebar untuk beberapa kegiatan antara lain :

- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pendidikan dan pelatihan formal
- Pengendalian dan Pelaporan Penerbitan SPD
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan APBD Kab/Kota
- Sosialisasi Regulasi Peraturan Keuangan Daerah
- Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian
- Pengumpulan dan Pemeliharaan Arsip Statis
- Penataan Aset
- Pencermatan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota
- Manajemen Peningkatan Pengelolaan Keuangan berbasis Sistem Informasi Manajemen
- Optimalisasi Investasi Pemerintah Provinsi Lampung

Sedangkan kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain:

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Penyusunan Laporan Keuangan
- Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SKPD-
- Penyusunan Program dan Laporan Capaian Kinerja
- Penyusunan Perda Perubahan APBD
- Penyusunan Pergub Perubahan APBD
- Penyusunan Perda APBD
- Penyusunan Pergub APBD
- Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Pemeliharaan dan Pelayanan Help Desk Informasi Keuangan Daerah
- Peningkatan administrasi pelayanan pada Kas Daerah Provinsi Lampung
- Tindak lanjut penyelesaian dan pemuktahiran data keuangan daerah
- Penyusunan Administrasi Pengelola Keuangan SKPD
- Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik
- Penatausahaan dan Pelaporan Pajak
- Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah
- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung
- Penyusunan laporan Realisasi bulanan triwulan dan semester pelaksanaan APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya
- Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah
- Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
- Pencatatan Administrasi Pendapatan OPD Provinsi Lampung
- Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK BLUD pada SKPD

### 3.8 Prestasi dan Penghargaan

#### 1. Opini WTP dari BPK untuk Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017.



#### 2. Penghargaan dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.





## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 98.50 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara mayoritas telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 25.889.476.250 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 23.883.126.723, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.006.349.527.

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 99.08 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 23.883.126.723 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung adalah 92,25 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.





Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

Drs. MINHAIRIN, M.M.

Pembina Utama Muda

19620603 198511 1 001



Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2019

*A* **KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**Drs. MINHAIRIN, M.M.**

**Pembina Utama Muda**

19620603 198511 1 001